

# Implementasi E-BUPOT pada Perusahaan untuk Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Pajak: Studi Kasus pada Masalah Input Data, Validasi, dan Integrasi Sistem

Ni Putu Ayu Siska Wulantari<sup>1\*</sup>, I Dewa Ayu Agung Tantri Pramawati<sup>2</sup>, Ketut Laksmi Maswari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Denpasar, Indonesia

<sup>1\*</sup> siskawulantari18@gmail.com\*, <sup>2</sup> dwayutantripramawati@gmail.com, <sup>3</sup> laksmi.m@instiki.ac.id

## INFO ARTIKEL

### Article history:

Received Juni 2025

Accepted Juli 2025

Published Juli 2025

## ABSTRAK

Pelaporan pajak penghasilan melalui sistem E-BUPOT (elektronik bukti potong) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, beberapa perusahaan menghadapi kendala teknis dalam implementasi E-BUPOT, seperti kesulitan dalam input data manual, ketidaksesuaian format data impor, serta masalah validasi NPWP dan NIK karyawan yang tidak sinkron dengan data Disdukcapil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses input dan pelaporan pajak menggunakan E-BUPOT serta menawarkan solusi optimal untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif pada sebuah perusahaan yang mengalami kendala terkait E-BUPOT. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta kuesioner. Penggunaan E-BUPOT memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam hal efisiensi pelaporan pajak, tetapi masih terdapat kendala dalam hal input data dan validasi. Otomatisasi, validasi pre-upload, serta penyesuaian data dengan Dukcapil adalah solusi yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem. Implementasi solusi ini diharapkan dapat membantu perusahaan mempercepat proses pelaporan pajak dan mengurangi risiko kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi administrasi.

Kata Kunci: E-BUPOT, Kendala, Efisiensi, Pelaporan Pajak

## ABSTRAK

*Income tax reporting through the E-BUPOT (electronic withholding slip) system is a mandatory obligation for companies in Indonesia. However, in practice, some companies face technical challenges in implementing E-BUPOT, such as difficulties with manual data input, mismatched import data formats, and validation issues with employee NPWP and NIK that are not synchronized with the Civil Registry (Disdukcapil) data. This study aims to analyze the challenges faced by companies in the data input and tax reporting process using E-BUPOT and to offer optimal solutions to improve the efficiency and accuracy of tax reporting. The method used in this research is descriptive qualitative, conducted at a company experiencing issues with E-BUPOT. Data were obtained through interviews, observations, and questionnaires. The use of E-BUPOT provides many benefits for companies in terms of tax reporting efficiency; however, there are still challenges related to data input and validation. Automation, pre-upload validation, and data alignment with the Civil Registry are solutions that can enhance the accuracy and efficiency of the system. The implementation of these*

---

*solutions is expected to help companies accelerate the tax reporting process and reduce the risk of errors that may result in administrative sanctions..*

*Keywords: E-BUPOT, Obstacles, Efficiency, Tax Reporting*

©2025 Authors. Licensed Under [CC-BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

---

## 1. Pendahuluan

Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual dengan pendekatan digital yang memungkinkan pengelolaan, pelaporan, dan penyimpanan data pajak secara terintegrasi. Diharapkan, E-BUPOT dapat meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, meminimalkan risiko kesalahan manusia, serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.(Munthe, 2024)

Namun, dalam praktiknya, adopsi E-BUPOT masih dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan operasional. Salah satu masalah yang sering muncul adalah proses input data secara manual yang membutuhkan waktu lama dan rawan kesalahan, terutama bagi perusahaan yang memiliki jumlah karyawan besar.(Widyowati et al., 2024) Selain itu, ketidaksesuaian format data impor antara sistem perusahaan dan E-BUPOT sering kali mengakibatkan kegagalan unggah data, sehingga memaksa pengguna untuk mengoreksi dan mengulang proses secara manual. Tantangan lainnya adalah masalah validasi data karyawan, terutama terkait NPWP dan NIK, yang sering kali tidak sinkron dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ketidaksesuaian ini tidak hanya memperlambat proses pelaporan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko dikenakannya sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun E-BUPOT memiliki potensi besar untuk menyederhanakan pelaporan pajak, implementasinya membutuhkan dukungan teknis yang lebih baik, pelatihan yang memadai bagi pengguna, serta peningkatan interoperabilitas sistem. Selain itu, perusahaan sering kali memerlukan solusi tambahan, seperti integrasi sistem E-BUPOT dengan perangkat lunak keuangan atau HRD yang sudah ada, untuk memastikan data yang digunakan selalu akurat dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan pajak.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam penggunaan E-BUPOT,(Verawati, 2024) baik dari segi teknis maupun operasional. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah yang muncul, memahami dampaknya terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan pajak, serta memberikan rekomendasi teknis dan prosedural yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi internal mereka, tetapi juga memberikan masukan bagi DJP dalam pengembangan dan perbaikan sistem E-BUPOT di masa depan.

Implementasi ini akan dilakukan untuk mengetahui; Bagaimana kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses input manual dan impor data ke dalam sistem E-BUPOT?; Bagaimana pengaruh kesalahan validasi data NPWP dan NIK terhadap proses pelaporan pajak?; Dan solusi apa yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala dalam penggunaan E-BUPOT?(Putri, 2024)

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, beberapa solusi teknis dan prosedural yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan adalah:

1. Otomatisasi Input Data : Pengembangan sistem yang memungkinkan otomatisasi input data dari sistem HR atau keuangan perusahaan ke dalam e-Bupot.(Nababan, 2024) Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada input manual dan mengurangi potensi kesalahan input.
2. Validasi Pre-Upload: Menambah keikutsertaan dalam sosialisasi terkait fitur validasi pre-upload dalam system impor DJP yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa kesesuaian data

sebelum diunggah ke sistem e-Bupot. Ini mencakup pengecekan format data, kesesuaian NPWP, NIK, nama karyawan serta alamat apakah sudah sesuai dengan prasyarat impor.

3. Penyelarasan Data sesuai Dukcapil: Meningkatkan koordinasi antara perusahaan dengan Karyawan untuk memastikan data karyawan (NIK/NPWP dan nama) sudah sesuai dengan yang tercatat di sistem. Sistem yang dapat memeriksa validitas data secara otomatis sebelum proses pelaporan akan sangat membantu mengurangi kesalahan.

Penelitian ini menggabungkan analisis teknis (sistem e-Bupot) dengan aspek operasional (kendala pengguna dan perusahaan)(Munandar et al., 2024) untuk menghasilkan solusi yang menyeluruh yang dialami staf pajak.

Usulan ini berfokus pada kebutuhan pengguna (staf pajak, HRD, akuntansi),(Wu'u, 2024) sehingga solusi yang ditawarkan bersifat praktis dan aplikatif sesuai dengan kendala yang mereka hadapi di lapangan. Menggunakan wawancara mendalam, observasi langsung dan kuesioner untuk memahami akar masalah dari perspektif pengguna sistem. Penelitian sebelumnya dilakukan (Kristianto, 2023), dalam judul Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Perpajakan Secara Elektronik Oleh Wajib Pajak menyatakan bahwa meningkatkan jumlah aplikasi berbasis web; melaksanakan sosialisasi layanan elektronik dan perpajakan secara berkesinambungan; memperluas akses terhadap informasi; menyediakan aplikasi simulasi (dummy) untuk pengguna; memperbaiki layanan elektronik secara berkala; serta menyederhanakan akses terhadap dokumen digital dalam proses administrasi perpajakan berbasis elektronik.

Penelitian (Pertiwi Riyanti Achmad & Bina Sarana Informatika Fauzan Akbar Albastiah, 2024) menyatakan menunjukkan bahwa PT ETA telah mematuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, namun melanggar Pasal 3 Ayat 3 pada UU RI Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu, implementasi pepadanan NIKNPWP dalam PMK 136 Tahun 2023 telah diterapkan dengan baik pada tahun pajak 2024.

Pada penelitian (Asmoro Wati, 2024) menyatakan bahwa PT XYZ telah menerapkan aplikasi e-bupot 21/26 untuk melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem perpajakan perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Dan pada penelitian (Putri, 2024) Penerapan e-Bupot membantu mengurangi risiko sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan. PT. Bali General Supply telah menggunakan e-Bupot PPh 21/26 untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan, sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2023 dan PER-2/PJ/2024, serta dilakukan tepat waktu. Sistem ini memberikan kemudahan seperti efisiensi waktu dan minimnya kesalahan, namun masih menghadapi kendala teknis seperti *error* dan *maintenance*, terutama mendekati tenggat waktu

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada perusahaan yang mengalami kendala dalam pelaporan pajak melalui E-BUPOT. Menurut Patton (2002), analisis data adalah proses mengatur dan mengorganisasi data ke dalam pola, kategori, atau uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang diperoleh (Somantri, 2005)

Model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman mencakup empat tahapan utama:

Pengumpulan Data (Data Collection):

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dengan staf akuntansi dan pajak perusahaan untuk memahami permasalahan yang terjadi. Observasi langsung terhadap proses input manual dan impor data ke dalam sistem E-BUPOT. Dokumentasi untuk meninjau laporan pajak perusahaan, format data, serta korespondensi dengan pihak WP terkait permasalahan teknis Kuesioner merupakan hasil survey dari WP untuk menginformasikan kendala yang dihadapi.

Reduksi Data (Data Reduction):

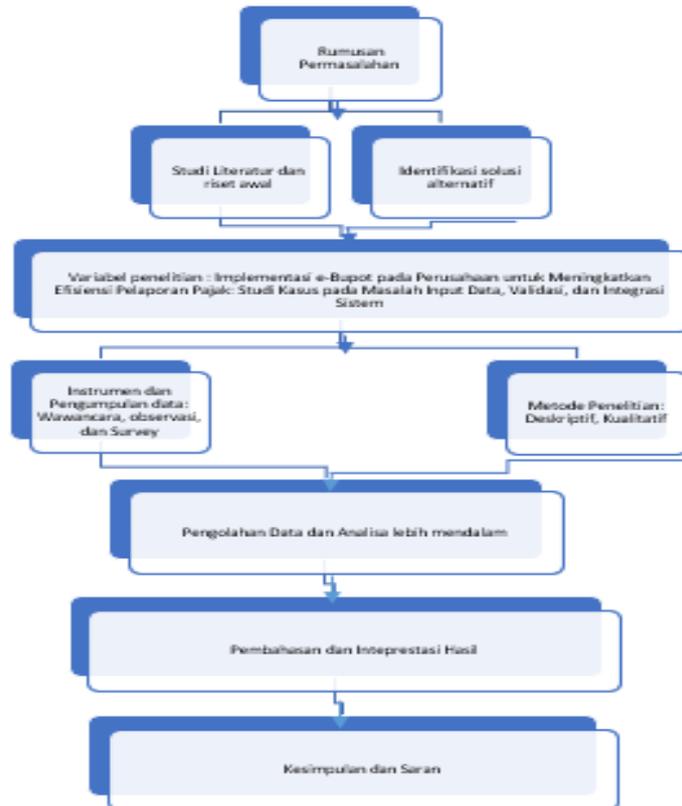
Tahap ini melibatkan proses seleksi, identifikasi, dan penyederhanaan data. Data yang tidak relevan dibuang, dan data penting dirangkum untuk menegaskan fokus penelitian. Proses ini membantu mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan.

Penyajian Data (Data Display):

Data disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, atau bagan untuk memberikan gambaran yang terstruktur. Penyajian ini bertujuan agar data tetap relevan dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan penelitian.

Penarikan Kesimpulan (Conclusion):

Kesimpulan dibuat dengan menjelaskan hubungan sebab-akibat atau menghasilkan proposisi berdasarkan data. Kesimpulan yang diambil diverifikasi secara cermat dengan mencocokkan kembali catatan lapangan untuk memastikan akurasi dan relevansi.



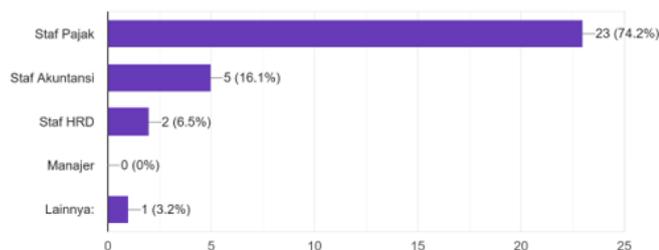
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Sumber: Penulis, 2025

(1)

### 3. Hasil dan Pembahasan

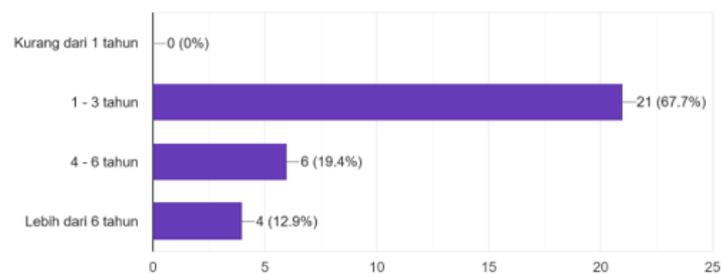
Bagian I: Identitas Responden 1. Jabatan Anda di Perusahaan  
31 responses



Gambar 2. Identitas Responden jabatan di perusahaan

Dari identitas responden yang mengisi kuesioner dari total responden: 31 orang. Rincian Jabatan: Staf Pajak – 23 orang (74,2%). Merupakan kelompok terbesar dalam responden. Hal ini sangat relevan karena staf pajak adalah pihak utama yang menangani pelaporan pajak menggunakan E-BUPOT. Staf Akuntansi – 5 orang (16,1%). Berperan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, yang juga memiliki keterkaitan dengan proses pajak, meskipun tidak sebesar peran staf pajak. Staf HRD – 2 orang (6,5%). Kemungkinan terlibat karena data karyawan (NPWP/NIK) yang di input ke sistem berasal dari bagian SDM. Manajer – 0 orang (0%). Tidak ada manajer yang mengisi survei ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengisian kuesioner dilakukan oleh pelaksana operasional, bukan pengambil keputusan. Lainnya – 1 orang (3,2%).

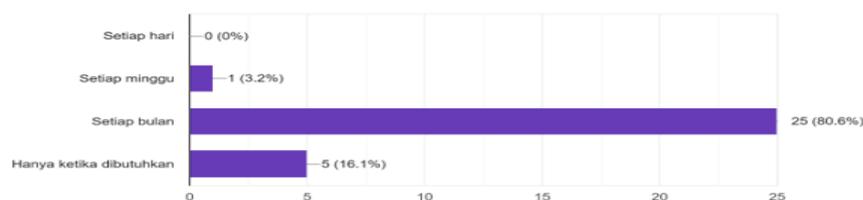
2. Lama Anda bekerja di perusahaan  
31 responses



Gambar 3. Lama anda responden bekerja di perusahaan tersebut

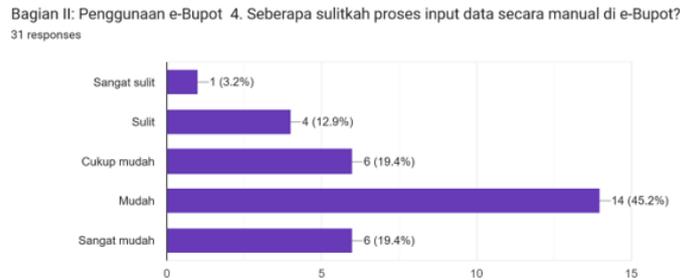
Hasil responden menyatakan 1–3 tahun: 21 responden (67,7%), 4–6 tahun: 6 responden (19,4%), dan Lebih dari 6 tahun: 4 responden (12,9%). Responden mayoritas telah bekerja cukup lama (lebih dari 1 tahun), sehingga mereka dipandang memiliki pengalaman yang cukup relevan untuk memberikan evaluasi terkait implementasi E-BUPOT. Tidak adanya responden baru (<1 tahun) memperkuat validitas hasil, karena partisipan benar-benar memahami proses dan kendala di lapangan. Mayoritas dalam kelompok 1–3 tahun menunjukkan tingginya partisipasi dari generasi pekerja yang adaptif terhadap sistem digital namun tetap bisa mengalami kendala teknis operasional.

3. Seberapa sering Anda menggunakan sistem e-Bupot?  
31 responses



Gambar 4. Seberapa sering responden menggunakan sistem E-BUPOT

Frekuensi penggunaan yang dominan bulanan (80,6%) sangat konsisten dengan karakteristik sistem E-BUPOT sebagai sarana pelaporan PPh pasal 21/23 yang bersifat periodik. Penggunaan hanya saat dibutuhkan (16,1%) menandakan masih adanya perusahaan yang bersifat *event-driven* dalam pelaporannya, bukan berbasis sistem terjadwal. Rendahnya pengguna mingguan atau harian menandakan bahwa E-BUPOT belum digunakan sebagai bagian dari proses pajak yang sangat dinamis, melainkan lebih administratif.



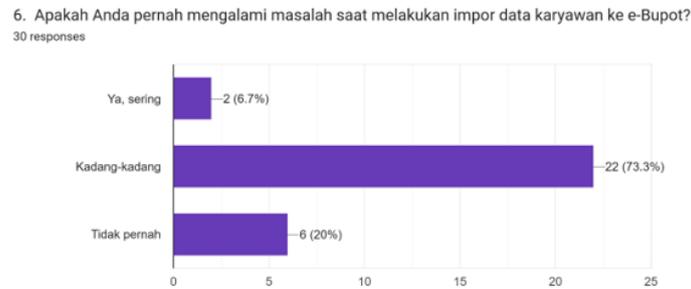
Gambar 5. Seberapa sulitkah proses input data secara manual di E-BUPOT

Mayoritas responden (84%) berada pada spektrum persepsi “cukup mudah” hingga “sangat mudah”, yang mengindikasikan bahwa antarmuka dan fitur E-BUPOT cukup dapat dioperasikan dengan baik. Namun, sekitar 16% responden merasa kesulitan, yang mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan sistem, terutama pada bagian antarmuka pengguna atau bantuan teknis. Temuan ini penting sebagai indikator kepuasan pengguna, dan sekaligus dasar dalam merekomendasikan otomatisasi proses input sebagai solusi yang akan meningkatkan efisiensi lebih lanjut.



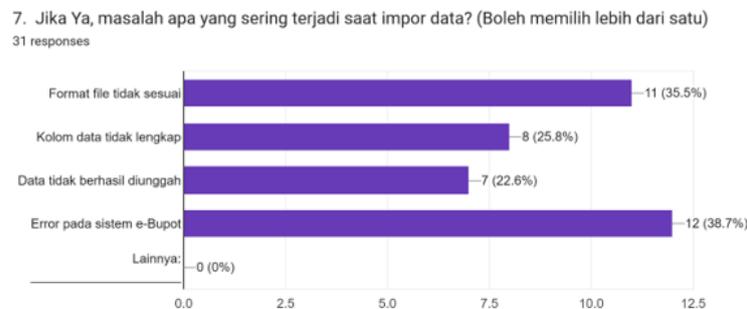
Gambar 6. Berapa banyak waktu yang biasanya dibutuhkan untuk input manual 50 karyawan ke dalam E-BUPOT

Hasil menunjukkan distribusi tanggapan terhadap pertanyaan: "Berapa banyak waktu yang biasanya dibutuhkan untuk input manual 50 karyawan ke dalam E-BUPOT?" (Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menginput 50 karyawan ke E-BUPOT secara manual?). Berikut analisis datanya: Respons Mayoritas (74,2%) : Sebagian besar responden menyatakan bahwa dibutuhkan waktu antara 1 hingga 2 jam untuk memasukkan data secara manual untuk 50 karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan waktu yang cukup lama untuk tugas ini, yang menyoroti potensi inefisiensi dalam proses yang dapat diuntungkan dari otomatisasi atau pengoptimalan. Respons Sedang (22,6%) : Kelompok yang lebih kecil, yang terdiri dari 22,6% responden, melaporkan bahwa tugas tersebut memerlukan waktu antara 3 hingga 4 jam. Hasil ini dapat menunjukkan situasi di mana kompleksitas tambahan, seperti masalah sistem atau entri data yang lebih rinci, berkontribusi pada perpanjangan waktu yang dibutuhkan. Respons Minimal (3,2%) : Hanya sebagian kecil (3,2%) yang mengindikasikan bahwa tugas tersebut memerlukan waktu kurang dari 1 jam, yang menunjukkan bahwa ini bukan pengalaman umum bagi sebagian besar pengguna. Tidak Ada Respons selama 4+ jam : Tidak ada respons yang menunjukkan bahwa tugas tersebut memerlukan waktu lebih dari 4 jam, yang berarti bahwa prosesnya, meskipun agak memakan waktu, biasanya tidak melampaui ambang batas ini.



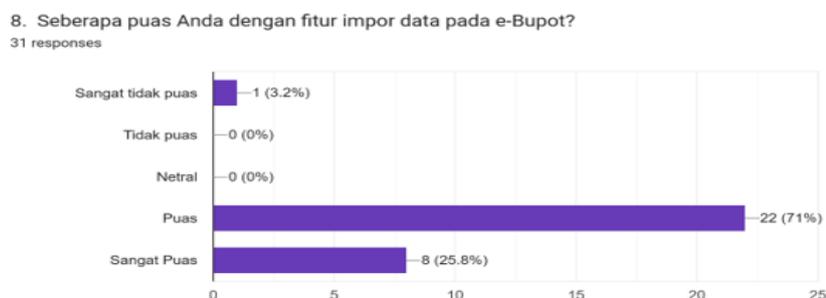
Gambar 7. Apakah Responden pernah mengalami masalah saat melakukan import data karyawan ke E-BUPOT?

Hasil menunjukkan persentase tinggi (73,3%) pengguna yang mengalami masalah sesekali menyoroti area yang perlu ditingkatkan. Mengatasi masalah ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan dan Kelompok yang lebih kecil. 20% yang melaporkan tidak ada masalah mungkin mewakili kasus "ideal", yang dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengoptimalkan pengalaman bagi orang lain.



Gambar 8. Jika Responden menyatakan ya, masalah apa yang sering terjadi saat import data? (responden boleh memilih lebih dari satu)

Berdasarkan hasil tanggapan dari 31 peserta, masalah yang paling sering diidentifikasi adalah: Error pada sistem E-BUPOT (38.7%), Format file tidak sesuai Terkait dengan permasalahan E-BUPOT (35,5%), Kolom data tidak lengkap (25.8%), Data tidak berhasil diunggah (22,6%) – Kategori ini menunjukkan bahwa beberapa responden menghadapi kesulitan dengan proses pengunggahan sebenarnya, yang dapat dikaitkan dengan masalah sistem atau file tertentu. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan terkait sistem, masalah format file, dan data yang hilang merupakan area paling kritis yang perlu diperbaiki saat menangani impor data.

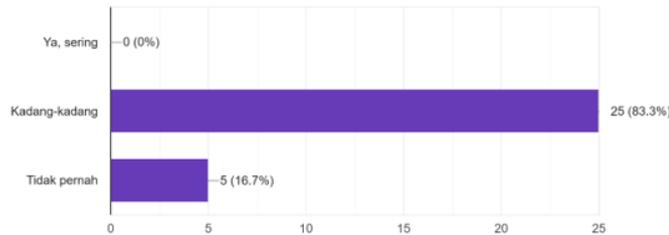


Gambar 9. Seberapa responden puas dengan fitur impor data pada E-BUPOT

Hasil tingkat kepuasan responden terhadap fitur impor data di E-BUPOT adalah sebagai berikut: Merasa Puas (71%), Sangat Puas (25,8%), Sangat Tidak Puas (3.2%), Tidak Puas dan Netral

(0%). Fitur impor data E-BUPOT sangat diapresiasi, dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Masalah yang diidentifikasi pada bagan sebelumnya, seperti format file dan kesalahan sistem, mungkin hanya memengaruhi sebagian kecil pengguna, tetapi sentimen keseluruhan tetap positif.

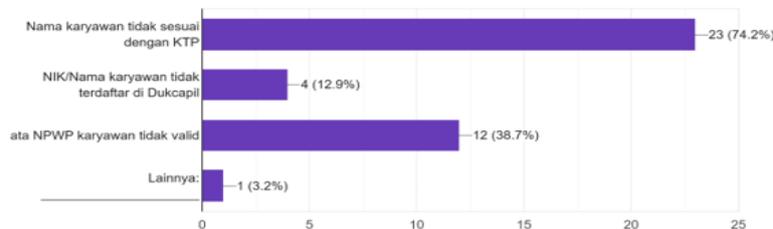
Bagian III: Validasi NPWP dan NIK 9. Apakah Anda sering mengalami masalah validasi NPWP atau NIK karyawan saat menggunakan e-Bupot?  
30 responses



Gambar 10. Validasi NPWP dan NIK, Apakah anda sering mengalami masalah validasi NPWP atau NIK Karyawan saat menggunakan E-BUPOT?

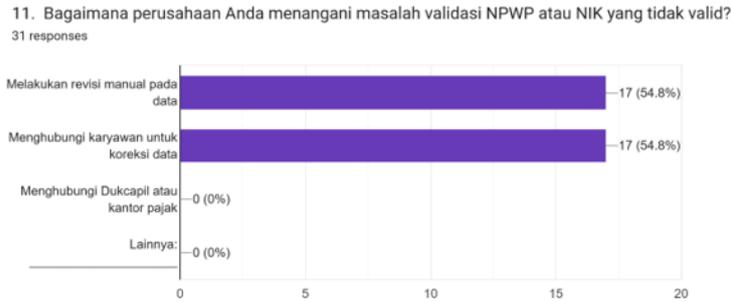
Hasil ini menunjukkan seberapa sering permasalahan yang dihadapi responden dalam melakukan validasi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kadang-kadang (83,3%), Tidak pernah (16,7%), Ya, sering (0%) Tidak ada responden yang melaporkan adanya kendala yang sering terjadi dalam validasi NPWP atau NIK. Artinya, meskipun kendala tersebut terjadi sesekali, namun tidak terjadi secara rutin pada semua peserta. Meskipun sebagian besar pengguna mengalami kendala sesekali dalam validasi NPWP atau NIK di E-BUPOT, ada sebagian kecil yang tidak mengalami kendala tersebut. Tidak adanya kendala yang sering terjadi merupakan pertanda positif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan agar proses validasi lebih konsisten.

10. Apa penyebab utama masalah validasi NPWP atau NIK karyawan? (Boleh memilih lebih dari satu)  
31 responses



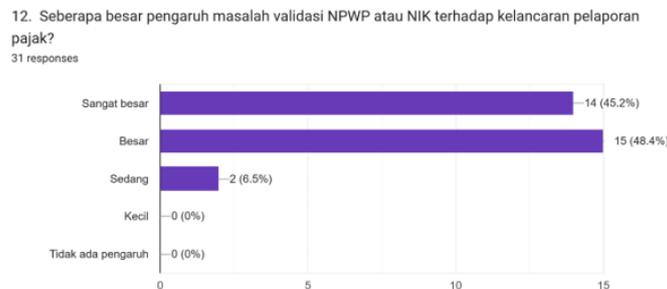
Gambar 11. Apa penyebab utama masalah validasi NPWP atau NIK karyawan?

Penyebab utama permasalahan validasi NPWP atau NIK bagi pegawai, berdasarkan Nama karyawan tidak sesuai dengan KTP (74,2%), Data NPWP karyawan tidak valid (38,7%), NIK>Nama karyawan waktu (12,9%) dan Lainnya (3,2%). Permasalahan yang paling krusial dalam validasi NPWP atau NIK adalah ketidaksesuaian nama antara KTP pegawai dengan data kepegawaian, diikuti dengan data NPWP yang tidak valid. Persoalan NIK atau nama yang tidak terdaftar di Dukcapil memang jarang terjadi, tetapi tetap saja perlu diperhatikan. Dengan mengatasi permasalahan utama ini, proses validasi di E-BUPOT dapat berjalan lebih baik.



Gambar 12. Bagaimana perusahaan anda menangani masalah validasi NPWP atau NIK yang tidak valid?

Hasil menunjukkan bagaimana perusahaan menangani masalah melakukan revisi manual pada data (54.8%), Menghubungi karyawan untuk memperbaiki data (54.8%), Menghubungi Dukcapil atau kantor pajak dan Lainnya (0%). Perusahaan umumnya menangani masalah NPWP atau NIK yang tidak valid dengan merevisi data secara manual atau menghubungi karyawan untuk melakukan koreksi. Tidak adanya tanggapan yang menunjukkan adanya kontak dengan Dukcapil atau kantor pajak menunjukkan bahwa proses tersebut biasanya ditangani secara internal.



Gambar 13. Seberapa besar pengaruh masalah validasi NPWP atau NIK terhadap kelancaran pelaporan pajak?

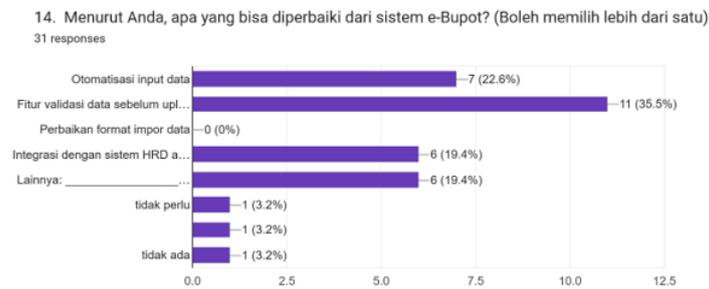
Hasil kuesioner menunjukkan seberapa signifikan dampak masalah validasi NPWP atau NIK terhadap kelancaran pelaporan pajak, berdasarkan tanggapan dari 31 peserta. Hasilnya adalah sebagai berikut: Sangat besar (45,2%), Besar (48,4%), Sedang (6,5%), Kecil (0%) dan Tidak Ada Pengaruh (0%). Permasalahan validasi NPWP dan NIK dinilai memiliki dampak yang cukup besar terhadap kelancaran pelaporan pajak bagi sebagian besar responden, dengan mayoritas sepakat bahwa permasalahan ini menimbulkan tantangan yang signifikan dalam proses mereka.



Gambar 14. Solusi dan Rekomendasi, apakah anda perlu adanya sistem otomatisasi input data untuk mempercepat proses pelaporan pajak?

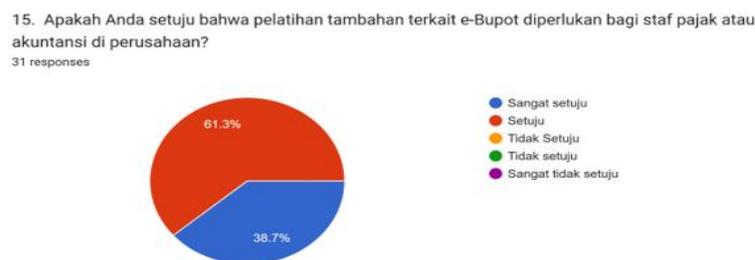
Hasil kuesioner menunjukkan tentang perlunya sistem input data otomatis untuk mempercepat proses pelaporan pajak: Perlu (41,9%), Tidak Perlu (38,7%), Tidak Yakin (16,1%) dan Sangat perlu

(3,2%). Meskipun mayoritas responden mengakui potensi manfaat otomatisasi dalam pelaporan pajak, sebagian besar masih lebih menyukai sistem saat ini atau tidak yakin akan dampaknya. Hal ini menunjukkan sentimen yang beragam terhadap pengenalan otomatisasi untuk input data.



Gambar 15. Menurut anda, apa yang bisa diperbaiki dari sistem E-BUPOT?

Hasil kuesioner berikut menguraikan saran-saran untuk meningkatkan sistem E-BUPOT, berdasarkan tanggapan responden: Fitur validasi data sebelum diunggah (35,5%), Otomatisasi input data (22%), Integrasi Dengan sistem HRD, Lainnya (19.4%), Perbaiki format impor data (0%), Tidak perlu dan tidak ada (3,2%). Perubahan paling mendesak yang ingin dilihat masyarakat dalam E-BUPOT meliputi validasi data yang lebih baik sebelum diunggah, otomatisasi input data, dan integrasi yang lebih baik dengan sistem HRD dan Dukcapil. Perubahan ini kemungkinan akan mengurangi jumlah kesalahan, mempercepat proses, dan menciptakan pengalaman yang lebih efisien bagi pengguna.



Gambar 16. Apakah Anda setuju bahwa pelatihan tambahan terkait E-BUPOT diperlukan bagi staf pajak atau akuntansi di perusahaan?

Hasil kuesioner dari responden mengenai perlu tidaknya pelatihan tambahan terkait E-BUPOT bagi staf pajak atau akuntan di perusahaan adalah Sangat setuju (61,3%), Setuju (38,7%), Tidak setuju (0%) dan Sangat tidak setuju (0%). Hampir semua responden berpendapat bahwa pelatihan tambahan tentang E-BUPOT diperlukan bagi staf yang terlibat dalam perpajakan atau akuntansi, mencerminkan konsensus yang jelas bahwa pelatihan sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan sistem di perusahaan.

## Pembahasan hasil penelitian

### 1. Profil Responden

Mayoritas responden berasal dari staf pajak (74,2%) dan staf akuntansi (16,1%) yang memang menjadi pelaksana utama dalam penggunaan E-BUPOT. Responden dengan pengalaman kerja 1–3 tahun (67,7%) menunjukkan bahwa pelaksana operasional yang relatif muda dan adaptif terhadap teknologi menjadi pengguna utama sistem ini.

### 2. Frekuensi dan Persepsi Penggunaan

Sebagian besar responden (80,6%) menggunakan E-BUPOT setiap bulan, selaras dengan sifat pelaporan PPh Pasal 21/23 yang bersifat periodik. Tingkat kemudahan penggunaan cukup tinggi, dengan 84% responden menyatakan bahwa sistem ini “cukup mudah” hingga “sangat mudah” digunakan. Namun, 16% responden tetap merasakan kesulitan, yang menunjukkan perlunya perbaikan dari sisi antarmuka dan bantuan teknis.

### 3. Efisiensi dan Kendala Input Data

Mayoritas responden (74,2%) membutuhkan waktu 1–2 jam untuk menginput data 50 karyawan secara manual. Hal ini menandakan proses input masih cukup memakan waktu dan belum efisien. Permasalahan umum yang muncul adalah error sistem (38,7%), format file tidak sesuai (35,5%), dan kolom data tidak lengkap (25,8%).

### 4. Validasi NPWP/NIK

Kendala validasi data NPWP atau NIK masih sering terjadi secara “kadang-kadang” (83,3%), yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian nama dengan KTP (74,2%) dan data NPWP tidak valid (38,7%). Dampaknya cukup signifikan terhadap kelancaran pelaporan, dengan 93,6% responden menyatakan pengaruhnya besar hingga sangat besar.

### 5. Solusi dan Persepsi Otomatisasi

Sebanyak 54,8% responden menyelesaikan kendala data dengan revisi manual atau menghubungi karyawan. Hanya sedikit yang mempertimbangkan untuk menghubungi instansi terkait, seperti Dukcapil atau kantor pajak. Terkait sistem otomatis, hanya 3,2% yang sangat setuju akan perlunya otomatisasi, sedangkan 41,9% setuju dan 38,7% tidak setuju. Ini menunjukkan adanya resistensi atau kurangnya pemahaman terhadap manfaat otomatisasi.

### 6. Saran dan Kebutuhan Pelatihan

Mayoritas responden memberikan masukan penting, seperti perlunya pemahaman lebih lanjut terkait fitur validasi data sebelum upload (35,5%) dan otomatisasi input data (22%). Menariknya, semua responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa pelatihan tambahan E-BUPOT dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pengguna

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 31 responden yang mayoritas merupakan staf pajak dan akuntansi, dapat disimpulkan bahwa:

Sistem E-BUPOT telah digunakan secara rutin dan dinilai cukup mudah dioperasikan oleh sebagian besar pengguna, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti error sistem, format file yang tidak sesuai ketika impor, dan validasi NPWP/NIK yang gagal. Terkadang pengguna yang akan membuat bukti potong karyawan yang banyak masih terkendala gagal impor karena kurangnya pemahaman akan sistem kerja impor file tersebut, sehingga perlunya edukasi bagi user terkait validasi otomatis sebelum proses upload agar kesalahan seperti format file tidak sesuai dan kolom kosong dapat diminimalisir lebih awal dan bukti potong dapat sukses tervalidasi.

Proses input data secara manual masih memakan waktu yang cukup lama, sehingga terdapat kebutuhan untuk otomatisasi input data dan pemahaman validasi file sebelum unggah/impor. Otomatisasi input data dapat dimulai dari perusahaan yang sudah memiliki integrasi sistem SDM dan akuntansi, sehingga manfaatnya dapat dibuktikan sebagai pilot project sebelum diperluas.

Mayoritas responden juga menilai bahwa permasalahan validasi data berdampak signifikan terhadap kelancaran pelaporan pajak, serta menekankan perlunya pelatihan tambahan agar staf yang terlibat dapat mengoptimalkan penggunaan E-BUPOT secara lebih efisien dan akurat.

## Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden dari berbagai jenjang jabatan, termasuk tenaga ahli (konsultan pajak), manajer atau pimpinan bagian, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kebijakan dan juga dapat mengkaji efektivitas program pelatihan terkait E-BUPOT terhadap peningkatan kompetensi staf dan penurunan jumlah kesalahan input serta kendala teknis.

## Daftar Pustaka

Asmoro Wati, S. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot 21/26 dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT XYZ di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2).

- Kristianto, A. R. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Perpajakan Secara Elektronik Oleh Wajib Pajak. *Pertemuan Ilmiah Taburan Nasional Asosiasi Profesi Widyaismara Indonesia*. <https://djponline.pajak.go.id/>.
- Munandar, A., Siregar, M. I., & Romli, H. (2024). Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. *Intercon Terminal Indonesia. AKM Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 1–16.
- Munthe, M. F. (2024). *Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan E-BUPOT 21/26 pada PT X*.
- Nababan, A. Y. A. (2024). *Prosedur Perhitungan dan Pembuatan Bukti Potong SPT Masa PPh 21/26 Atas Karyawan Tetap Melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi*.
- Pertiwi Riyanti Achmad, F., & Bina Sarana Informatika Fauzan Akbar Albastiah, U. (2024). Analisis Implementasi PPh 21 Non Pegawai Melalui e-Bupot 21 Dalam Pemadanan NIK-NPWP di PT ETA. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3), 209–215. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2625>
- Putri, N. K. I. P. (2024). *Analisis Penerapan E-BUPOT PPH 21 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 (Studi Kasus PT. Bali General Supply)*.
- Somantri, G. R. (2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Verawati, E. (2024). *Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 PT. X. dengan Menggunakan Tarif TER 2024*.
- Widyowati, L. A., Ningsih, S., Landong, N., Sihombing, N., Aminah, A., Jalih, J. H., Qadaar, A., Teknologi, I., Bisnis, D., Dahlan Jakarta, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., Dharma, T., & Jakarta, W. (2024). Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode TER di SMK LP3 Istana Jakarta. *Jumas : Jurnal Masyarakat*, 04(01), 1–6. <https://doi.org/10.54209/jumas.v4i01.146>
- Wu'u, D. K. (2024). *Prosedur Perhitungan dan Pembuatan Bukti Potong SPT Masa PPh 21/26 Atas Karyawan Tetap Melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi*.